

**IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) DESA DI DESA REMPANGA KECAMATAN LOA
KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI
KASUS PERTUMBUHAN EKONOMI DESA)**

Hafidz Rizky Kuntoro, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Di
Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai
Kartanegara (Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Desa).

Pengarang : Hafidz Rizky Kuntoro

NIM : 1802015011

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Juli 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP 195903081984032001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 789-798

IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DESA DI DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI KASUS PERTUMBUHAN EKONOMI DESA)

Hafidz Rizky Kuntoro ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, khususnya tujuan ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi desa yang merata, di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada empat indikator: Produk Domestik Bruto (PDB) Desa, pekerja sektor formal, pengangguran terbuka, dan pelatihan angkatan kerja baru. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa di Desa Rempanga telah berjalan namun belum optimal. PDB desa belum terealisasi maksimal karena stagnasi pengelolaan potensi sektor perikanan. Pekerja sektor formal menunjukkan perkembangan positif melalui program perlindungan sosial dan hukum, namun mayoritas penduduk masih bekerja di sektor informal. Pengangguran terbuka mengalami peningkatan, menunjukkan belum tercapainya target SDGs. Pelatihan angkatan kerja baru telah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hambatan utama dalam implementasi mencakup rendahnya penyerapan nilai PDB dari subsektor potensial, dominasi sektor informal dalam lapangan kerja, serta program pelatihan yang monoton dan kurang partisipatif. Hal ini menjadi tantangan utama dalam pencapaian target SDGs Desa, khususnya dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Implementasi SDGs Desa, Pertumbuhan Ekonomi, PDB Desa, Sektor Formal, Pengangguran Terbuka, Pelatihan Kerja, Desa Rempanga*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas global sejak disepakatinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, yang menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs). Indonesia, sebagai salah satu negara yang turut merumuskan dan menandatangani SDGs, menunjukkan komitmen melalui integrasi tujuan tersebut dalam dokumen perencanaan nasional, seperti

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hafidzkuntoro1@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah penerapan SDGs di tingkat desa, yang kemudian dituangkan dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program ini menjadi strategi penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, dengan 18 tujuan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu desa mandiri di Kalimantan Timur, turut melaksanakan program SDGs Desa. Namun, capaian terkait tujuan kedelapan tentang pertumbuhan ekonomi desa merata masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Data capaian tahun 2022 menunjukkan bahwa indikator-indikator seperti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Desa, pekerja sektor formal, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, serta pelaksanaan pelatihan angkatan kerja baru masih berada di bawah target. Beberapa kendala yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19, rendahnya tingkat sosialisasi, serta keterbatasan pemahaman masyarakat desa terkait tujuan SDGs.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait bagaimana implementasi SDGs Desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa merata di Desa Rempanga dijalankan. Kajian ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Desa)”**.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses transformasi kebijakan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2014), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten antara pembuat dan pelaksana kebijakan sangat menentukan pemahaman dan arah kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup anggaran, aparatur, serta sarana-prasarana yang mendukung. Disposisi merujuk pada komitmen dan sikap pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mencakup alur koordinasi, pembagian tugas, serta regulasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi kebijakan publik sering dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, kurangnya dukungan anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu,

model implementasi Edward III digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami pelaksanaan tujuan kedelapan SDGs Desa yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi desa merata di Desa Rempanga.

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang terintegrasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan prinsip utama “no one left behind”. Agenda ini menjadi arah pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang (Brundtland Report dalam Runa, 2012).

Konsep pembangunan berkelanjutan yang melandasi SDGs menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemerataan sosial (Fauzi & Oktavianus, 2014). Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan angka-angka ekonomi, melainkan juga pada kualitas hidup, keadilan sosial, dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Di Indonesia, implementasi SDGs dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah.

SDGs Desa

Indonesia menerjemahkan agenda global SDGs ke dalam konteks lokal melalui kebijakan SDGs Desa, yang diatur dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. SDGs Desa mencakup 18 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu tujuan utama adalah tujuan kedelapan, yaitu "Desa dengan pertumbuhan ekonomi merata" yang mencakup indikator Produk Domestik Bruto (PDB) Desa, pekerja sektor formal, pengangguran terbuka, dan pelatihan angkatan kerja baru (Kemendes PDTT, 2020).

SDGs Desa mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan desa melalui pendekatan berbasis data mikro, partisipasi masyarakat, dan potensi lokal. Dengan SDGs Desa, pembangunan desa diarahkan untuk lebih inklusif, adil, dan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penerapan tujuan kedelapan menjadi sangat strategis karena menysasar akar permasalahan ekonomi desa dan mendorong desa untuk mandiri secara ekonomi.

Definisi Konsepsional

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam implementasinya di tingkat desa (SDGs Desa), fokus utama diarahkan pada pencapaian tujuan kedelapan, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Indikator utama dari tujuan ini meliputi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Desa, peningkatan jumlah pekerja sektor formal, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta penyelenggaraan pelatihan angkatan kerja baru. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur dalam mengkaji sejauh mana program SDGs Desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas kerja masyarakat desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada implementasi SDGs Desa tujuan 8 tentang pertumbuhan ekonomi desa merata di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Aspek yang dikaji meliputi empat indikator utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) Desa, pekerja sektor formal, tingkat pengangguran terbuka, dan pelatihan angkatan kerja, serta faktor-faktor penghambat implementasinya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Urusan Umum Desa Rempanga, Kepala Desa, dan Direktur BUMDes yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan desa, laporan pendataan SDGs Desa, serta arsip administrasi lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Desa)

Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis lokal yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan. Di Desa Rempanga, implementasi SDGs Desa secara khusus difokuskan pada pencapaian Tujuan 8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Tujuan ini tidak hanya menekankan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mengedepankan pemerataan akses dan dampak ekonomi yang berkeadilan.

SDGs Desa menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan partisipatif dalam perumusan arah kebijakan pembangunan desa (Iskandar, 2020:51). Pemerintah Desa Rempanga menjalankan peran strategis dalam menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kondisi sosial masyarakat, termasuk pengembangan sektor

perikanan, pertanian, UMKM, dan pariwisata. Pendataan SDGs Desa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi capaian pembangunan secara berkala.

Secara operasional, pencapaian SDGs Desa Tujuan 8 diukur melalui empat indikator utama, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) Desa, pekerja sektor formal, tingkat pengangguran terbuka, dan pelatihan angkatan kerja baru. Keempat indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi desa telah menunjukkan hasil yang merata dan berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Produk Domestik Bruto Desa

Capaian PDB Desa Rempanga tahun 2023 baru mencapai Rp14.256.090,78 atau 47,05% dari target ideal SDGs Desa sebesar Rp30 juta per kapita. Sektor perikanan menjadi penyumbang terbesar, didukung oleh posisi strategis desa sebagai kawasan minapolitan, namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan nilai PDB secara signifikan dari tahun ke tahun. Iskandar (2020:67) menyebutkan bahwa PDB Desa merupakan indikator penting dalam menilai kekuatan dan kemajuan ekonomi desa karena mencerminkan nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi lokal. Pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa juga cukup tinggi karena letak desa yang strategis di kecamatan, tetapi beberapa sub sektor lainnya belum tergarap maksimal. Hutahaean (2019:107) menekankan bahwa peningkatan PDB memerlukan penguatan struktur setiap sektor ekonomi agar dapat mendorong kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Selain itu, Wibowo (2016:127) menegaskan bahwa perdagangan dan jasa berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa, khususnya dalam meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

2. Pekerja Sektor Formal

Persentase pekerja sektor formal di Desa Rempanga hanya mencapai 27,16% dari total penduduk usia kerja, masih jauh dari target SDGs sebesar 51%. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil. Gunawan (2018:151) menyatakan bahwa dominasi pekerja informal menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan terbatasnya perlindungan sosial. Pemerintah desa telah mendorong perlindungan pekerja formal melalui jaminan sosial, di antaranya dengan menjadikan 1459 pekerja sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. Waluyo & Kharisma (2023:82) menyebutkan bahwa jaminan sosial memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Namun, proses peralihan dari sektor informal ke formal masih mengalami hambatan struktural dan kultural.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Desa Rempanga mengalami peningkatan dari 34,1% pada 2021 menjadi 34,8% pada 2023. Peningkatan ini

dipicu oleh pertumbuhan penduduk usia produktif dan terbatasnya lapangan kerja formal. Rahman dan Riani (2023:45) menjelaskan bahwa TPT menjadi salah satu indikator utama dalam menilai dinamika ekonomi dan sosial wilayah karena mencerminkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. BUMDes Rempanga telah meluncurkan delapan program pemberdayaan berbasis potensi lokal, seperti perikanan, perdagangan dan jasa, dan pertanian. Rahayu dan Febrina (2021:53) menegaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampaknya terhadap penurunan pengangguran belum terlalu signifikan.

4. Pelatihan Tenaga Kerja

Capaian indikator pelatihan angkatan kerja baru di Desa Rempanga pada tahun 2023 baru mencapai 7,9%, jauh dari target 100%. Program pelatihan yang ada masih bersifat rutin dan belum merata menjangkau semua kalangan, khususnya pemuda. Menurut Iskandar (2020:92), pendidikan dan pelatihan merupakan investasi utama dalam pembangunan SDM desa agar mampu bersaing di pasar kerja. Adriyanto et al. (2020:76) juga menekankan pentingnya pelatihan angkatan kerja sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja generasi muda. Rendahnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya inovasi, minimnya pendekatan pemerintah daerah secara masif, dan tidak terpadunya pelatihan dengan peluang kerja yang tersedia.

Faktor Penghambat Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Desa)

Implementasi SDGs Desa di Desa Rempanga menghadapi tiga hambatan utama. Pertama, belum optimalnya penyerapan nilai PDB dari seluruh sektor ekonomi akibat kontribusi sub sektor yang stagnan. Rahmadi & Parmadi (2019:65) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi desa akan terhambat jika diversifikasi sektor tidak berjalan maksimal. Kedua, dominasi pekerja informal yang sulit dimasukkan dalam sistem formal, sesuai dengan temuan Nawir et al. (2022:4) bahwa rendahnya pekerja sektor formal berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, program pelatihan angkatan kerja masih monoton dan belum menjangkau secara menyeluruh. Kamelia (2021:212) menekankan bahwa program pelatihan harus selaras dengan kebutuhan pasar agar mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Secara keseluruhan, implementasi SDGs Desa di Desa Rempanga telah menunjukkan progres, namun belum mampu mencapai target indikator secara optimal. Dibutuhkan strategi inovatif dan kolaboratif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa secara merata dan berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya pada tujuan kedelapan mengenai pertumbuhan ekonomi desa merata, telah berjalan namun belum mencapai target yang ditetapkan.

Secara rinci, capaian pada indikator Produk Domestik Bruto (PDB) Desa menunjukkan peningkatan, namun realisasinya masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan, disebabkan oleh stagnasi pertumbuhan di beberapa sektor utama seperti perikanan dan perdagangan. Indikator pekerja sektor formal juga menunjukkan capaian di bawah target, dengan dominasi pekerja sektor informal yang berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi desa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di desa ini cenderung tinggi, meskipun berbagai upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes. Sementara itu, program pelatihan angkatan kerja baru telah berjalan, namun belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa.

Faktor utama yang menghambat implementasi SDGs Desa meliputi rendahnya penyerapan PDB dari sub sektor ekonomi lokal, keterbatasan lapangan pekerjaan formal, serta kurang inovatifnya pelaksanaan program pelatihan angkatan kerja baru. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada lambatnya proses pencapaian target pertumbuhan ekonomi desa merata sesuai dengan tujuan SDGs Desa kedelapan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperbaiki implementasi SDGs Desa tujuan kedelapan di Desa Rempanga:

1. **Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Kemitraan Swasta**
Pemerintah Desa Rempanga perlu mendorong diversifikasi ekonomi desa melalui pengembangan sektor-sektor potensial seperti industri olahan hasil perikanan, perdagangan desa, dan jasa pariwisata berbasis potensi lokal. Selain itu, perlu dibangun kemitraan strategis dengan pihak swasta, terutama perusahaan yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dalam bentuk bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar.
2. **Peningkatan Transformasi Tenaga Kerja ke Sektor Formal**
Upaya legalisasi usaha mikro dan kecil perlu dipercepat melalui penyederhanaan proses perizinan di tingkat desa. Pemerintah Desa dapat memberikan insentif berupa bantuan modal, fasilitasi jaminan sosial, serta program pendampingan usaha untuk mendorong peralihan pekerja dari sektor informal ke sektor formal.

3. Pengembangan Program Pelatihan Angkatan Kerja Baru yang Lebih Inovatif

Program pelatihan kerja di Desa Rempanga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan potensi lokal. Pemerintah Desa disarankan menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi vokasi, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperluas cakupan materi pelatihan, seperti keterampilan digital, kewirausahaan, dan pengolahan produk lokal. Selain itu, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan agar dampak program lebih terukur.

Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi desa di Desa Rempanga dapat berjalan lebih merata dan selaras dengan target SDGs Desa (8) pertumbuhan ekonomi desa merata.

Daftar Pustaka

- Adriyanto, Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik: Pengantar* (Edisi ke-2). Pustaka Setia.
- Angraini, M. S., Sula, A. E., & Rohmania. (2024). Pengelolaan BUMDES Wisata Pesisir Madura dalam Meningkatkan Pendapatan Desa sebagai Ekonomi Desa. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 9(2), 113–129.
- Firman. (2020, November 2). *SDGs Desa Berkontribusi 74 Persen atas Pencapaian Nasional*. Humas Kemendesa PDTT. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3486/sdgs-des-a-berkontribusi-74-persen-atas-pencapaian-nasional>
- Gunawan, B. T. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pasar Tenaga Kerja: Analisis Sektor Formal dan Informal Level Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 2(2), 149–161.
- Handoyo, R., Sofie, & Wardhani, N. K. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Goal 8 pada Pelaku Usaha Mikro di Desa Padas, Kecamatan Karangnom dan Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 107–116. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.16234>
- Hutahaean, P. (2019). Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 3(2), 104–115.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kamelia, N., & Nugraha, J. (2021). Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. *Journal of Economics*, 1(1), 205–221.
- Kemendes PDTT. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muliza. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. *IOKOS: Jurnal Kajian Pendidikan dan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 6(1), 1–11.
- Pandiangan, M. (2021). Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peran Pemerintah Desa. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 3(2), 134–140.
- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Pustaka Ramadhan.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES di Desa Sungai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.
- Rahmadi, S., & Parmadi. (2019). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66.
- Rahman, N. A., & Riani, Z. R. (2023). Analisis Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan (JKEP)*, 5(3), 43–50.
- Runa, I. W. (2012). Pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* untuk kegiatan ekowisata. *Jurnal Kajian Bali*, 2(1), 149–162.
- Ruru, A., Lengkong, F. D., & Ruru, J. M. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/30545>
- Rusmiyatun, Respatiningsih, H., & Sucipto, A. (2023). Evaluasi Implementasi SDGs Desa Krandegan Bidang Ekonomi sebagai Desa Mandiri Tahun 2022. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 8 Agustus 2023, 338–352.
- Sidik, A., & Nanang, M. (2023). Upaya Pemerintah Desa Untuk Mengurangi Angka Pengangguran di Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *eJournal Pembangunan Sosial*, 11(1), 579–589.
- Sigit, T. A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Penbedaharaan, Keuangan Negara*

- dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9, 39–50.
- Suwito Eko Pramono, S. (2022). *Buku Panduan Unnes Giat Penguatan Generasi Milenial Mendukung SDGs Desa*. LPPM UNNES.
- Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 293–301.
- Triyana, L., Murwani, J. L. S., Abidin, Z., Afkarina, A. N., Indrastama, M., Heriyanto, T., Kurahman, F., Iswadi, A. K. R., Affandi, M. B., Kasau, M. R. M. D., & Tombuku, A. F. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya dan Dampak Illegal Fishing di Desa Rempanga, Kutai Kartanegara. *EL-MUJTAMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 372–382. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i1.6001>
- UNDP (United Nations Development Programme). (2015). *What are the Sustainable Development Goals?* <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Waluyo, & Kharisma, D. B. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 81–95.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1117>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 2(2), 112–132.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/184>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.